

**PERAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM MENDORONG KEMANDIRIAN
FISKAL MELALUI KONTRIBUSI, EFEKTIVITAS, DAN DESENTRALISASI
DI KOTA JAMBI**

Juwita Sirait¹, Junaidi², Parmadi³

^{1,2,3} Program Studi Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Jambi
juwitasirait@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the contribution, effectiveness, and degree of fiscal decentralization of Local Own-Source Revenue (PAD) of Jambi City during the 2020–2024 period. The background of this study is based on the importance of PAD as an indicator of regional fiscal independence in the era of regional autonomy, where local governments are required to optimize their revenue sources independently. The research method used is a quantitative descriptive approach using secondary data obtained from the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK). The analysis was conducted using contribution ratios, effectiveness ratios, and fiscal decentralization degree ratios. The results show that the contribution of PAD to the total regional revenue of Jambi City is still relatively low, ranging from 22% to 33%, indicating a high dependence on transfer funds from the central government. The effectiveness level of PAD shows fluctuating conditions, where in several years the realization has not optimally achieved the predetermined targets. In addition, the degree of fiscal decentralization in Jambi City remains in the low category, indicating that the level of regional financial independence is not yet optimal. Therefore, efforts are needed to optimize the management of PAD sources and to diversify regional revenue in order to enhance sustainable fiscal independence.

Keywords: *Local Own-Source Revenue, contribution, effectiveness, fiscal decentralization, regional financial independence.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi, efektivitas, dan derajat desentralisasi fiskal Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jambi selama periode 2020–2024. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pentingnya PAD sebagai indikator kemandirian fiskal daerah dalam era otonomi daerah, di mana pemerintah daerah dituntut mampu mengoptimalkan sumber pendapatan secara mandiri. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Analisis dilakukan dengan menggunakan rasio kontribusi, rasio efektivitas, dan rasio derajat desentralisasi fiskal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah Kota Jambi masih tergolong rendah, dengan kisaran 22%–33%, yang mengindikasikan masih tingginya ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Tingkat efektivitas PAD menunjukkan kondisi yang fluktuatif, di mana pada beberapa tahun realisasi belum mampu mencapai target yang telah ditetapkan secara optimal.

Selain itu, derajat desentralisasi fiskal Kota Jambi masih berada pada kategori rendah, sehingga menunjukkan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah belum maksimal. Dengan demikian, diperlukan upaya optimalisasi pengelolaan sumber-sumber PAD serta diversifikasi pendapatan daerah guna meningkatkan kemandirian fiskal secara berkelanjutan.

Kata kunci: *Pendapatan Asli Daerah, kontribusi, efektivitas, desentralisasi fiskal, kemandirian daerah.*

A. Pendahuluan

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia merupakan bagian dari kebijakan desentralisasi fiskal yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian daerah dalam pembiayaan pembangunan serta mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Dalam konteks ini, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi indikator utama dalam menilai kemampuan keuangan daerah. Semakin besar peranan PAD dalam struktur pendapatan daerah, maka semakin tinggi tingkat kemandirian fiskal suatu daerah. Oleh karena itu, pengelolaan PAD yang optimal menjadi hal yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan otonomi daerah.

Kinerja PAD tidak hanya dapat dilihat dari besarnya penerimaan, tetapi juga dari beberapa indikator utama, yaitu kontribusi terhadap pendapatan daerah, tingkat efektivitas pencapaian target, serta derajat desentralisasi fiskal. Kontribusi PAD

mencerminkan peranan PAD dalam struktur pendapatan daerah, efektivitas menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan target yang telah ditetapkan, sedangkan derajat desentralisasi fiskal menggambarkan tingkat kemandirian keuangan daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan. Ketiga indikator tersebut menjadi ukuran penting dalam mengevaluasi kinerja keuangan daerah secara komprehensif.

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kinerja PAD di daerah masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi efektivitas, kontribusi, maupun tingkat kemandirian fiskal. Beberapa daerah menunjukkan tingkat efektivitas yang tinggi, namun belum diikuti dengan peningkatan kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah secara signifikan. Sebaliknya, terdapat daerah yang memiliki kontribusi PAD rendah serta masih bergantung pada dana transfer

dari pemerintah pusat. Hal ini menunjukkan bahwa optimalisasi PAD masih menjadi isu strategis dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia.

Kota Jambi sebagai ibu kota Provinsi Jambi memiliki peran strategis sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, dan aktivitas ekonomi. Dengan potensi ekonomi yang dimiliki, Kota Jambi seharusnya mampu meningkatkan kinerja PAD secara optimal. Namun demikian, kondisi empiris menunjukkan bahwa kinerja PAD Kota Jambi masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya dalam menjaga stabilitas penerimaan dan pencapaian target yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilihat pada data target dan realisasi PAD berikut.

Tabel 1. Perkembangan PAD Kota Jambi Tahun 2020-2024

Tahun	Target Pendapatan (Miliar)	Realisasi (Miliar)	Perkembangan PAD (%)
2020	403,48	355,67	-
2021	419,56	384,73	8,17
2022	465,89	436,89	13,56
2023	515,34	415,9	-4,80
2024	545,54	455,26	9,46

Sumber : Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK)

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), realisasi PAD Kota Jambi dalam lima tahun terakhir (2020–2024) menunjukkan perkembangan

yang berfluktuasi. Setelah mengalami pertumbuhan pada tahun 2021 dan 2022, realisasi PAD mengalami penurunan pada tahun 2023 sebelum kembali meningkat pada tahun 2024. Meskipun demikian, pada beberapa tahun realisasi PAD belum sepenuhnya mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pengelolaan sumber-sumber PAD belum berjalan secara optimal dan masih menghadapi kendala dalam mempertahankan kinerja penerimaan yang stabil dan berkelanjutan. Fluktuasi tersebut juga mencerminkan belum konsistennya kemampuan daerah dalam mengoptimalkan potensi pendapatan, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kapasitas fiskal daerah.

Selain itu, permasalahan PAD di Kota Jambi tidak hanya terletak pada pencapaian target, tetapi juga berkaitan dengan kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah serta tingkat kemandirian fiskal. Ketergantungan terhadap sumber pendapatan tertentu dan belum optimalnya pemanfaatan seluruh potensi PAD menunjukkan bahwa struktur penerimaan daerah masih belum seimbang. Kondisi ini

berdampak pada derajat desentralisasi fiskal yang belum optimal, sehingga kemampuan keuangan daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan secara mandiri masih terbatas.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis kontribusi, efektivitas, dan derajat desentralisasi fiskal Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jambi selama periode 2020–2024. Analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kinerja keuangan daerah serta menjadi dasar dalam upaya peningkatan kemandirian fiskal daerah secara berkelanjutan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk menggambarkan kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jambi periode 2020–2024 secara sistematis berdasarkan data numerik. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa laporan realisasi anggaran yang bersumber dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), Badan Pusat Statistik (BPS) Kota

Jambi, serta Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPKRD) Kota Jambi.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan rasio keuangan daerah. Rasio yang digunakan terdiri dari tiga indikator utama, yaitu rasio kontribusi, rasio efektivitas, dan derajat desentralisasi fiskal (DDF). Rasio kontribusi digunakan untuk mengukur proporsi masing-masing komponen PAD terhadap total PAD (Mahmudi, 2016). Rasio efektivitas digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan realisasi penerimaan PAD dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam APBD (Halim, 2004). Sementara itu, derajat desentralisasi fiskal (DDF) digunakan untuk mengukur tingkat kemandirian keuangan daerah melalui perbandingan antara PAD dan total pendapatan daerah (Halim, 2004).

Hasil perhitungan masing-masing rasio kemudian diinterpretasikan berdasarkan kriteria yang dikemukakan oleh Mahmudi (2016) dan Halim (2004) untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai kinerja keuangan daerah.

Selanjutnya, untuk memperjelas proses analisis yang dilakukan,

masing-masing indikator diuraikan secara lebih rinci pada bagian berikut.

1) Analisis Kontribusi Komponen PAD

Analisis kontribusi dilakukan untuk mengetahui besarnya peran masing-masing komponen PAD, yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah, terhadap total Pendapatan Asli Daerah.

Rumus yang digunakan dalam analisis ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kontribusi Komponen PAD} : \frac{\text{Realisasi Komponen PAD}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Tingkat kontribusi dapat dinilai berdasarkan persentase tertentu yang digunakan sebagai acuan, seperti pada tabel berikut.

Tabel 2. Indikator Kontribusi PAD

Indikator Kontribusi (%)	Kriteria
0 - 10	Sangat Kurang
10 - 20	Kurang
20 - 30	Sedang
30 - 40	Cukup Sedang
40 - 50	Baik
>50	Sangat Baik

Sumber : (Mahmudi, 2016).

2) Analisis Efektifitas Komponen PAD

Analisis efektivitas dilakukan untuk menilai tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam

merealisasikan penerimaan masing-masing komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah, dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.

Rumus yang digunakan dalam analisis ini adalah :

$$\text{Rasio Efektifitas Komponen PAD} : \frac{\text{Realisasi Komponen PAD}}{\text{Target Komponen PAD}} \times 100\%$$

Rasio efektivitas komponen PAD mengukur tingkat keberhasilan realisasi penerimaan terhadap target yang telah ditetapkan. Nilainya kemudian diinterpretasikan berdasarkan kriteria berikut.

Tabel 3. Indikator Efektivitas PAD

Indikator Efektivitas (%)	Kriteria
>100	Sangat Efektif
90 - 100	Efektif
80 - 90	Cukup Efektif
60 - 80	Kurang Efektif
<60	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996.

3) Analisis Derajat Desentralisasi Fiskal

Analisis derajat desentralisasi fiskal digunakan untuk mengukur

tingkat kemandirian keuangan daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta untuk melihat kemampuan daerah dalam mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Indikator ini dihitung melalui perbandingan antara PAD dengan total pendapatan daerah.

Rumus yang digunakan dalam analisis ini adalah sebagai berikut.

$$\text{Derajat Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Menurut Halim (2007), semakin tinggi nilai rasio tersebut, maka semakin kuat kemampuan suatu daerah untuk memenuhi kebutuhan fiskalnya secara mandiri tanpa terlalu bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat.

Tabel 4. Indikator Derajat Desentralisasi Fiskal

Indikator DDF (%)	Kriteria
0 – 10	Sangat Kurang
10 – 20	Kurang
20 - 30	Sedang
30 - 40	Cukup
40 - 50	Baik
>50	Sangat Baik

Sumber : (Halim, 2004).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1) Analisis Kontribusi Komponen PAD

Tabel 5. Kontribusi Pajak Daerah

Tahun	Pajak Daerah (Miliar)	PAD (Miliar)	Kontribusi (%)	Kriteria
2020	355,67	216,96	61,00	Sangat Baik
2021	384,73	244,73	64,61	Sangat Baik
2022	436,89	301,8	69,08	Sangat Baik
2023	415,34	301,36	58,48	Sangat Baik
2024	455,26	330,06	72,50	Sangat Baik
Rata-rata			64,93	Sangat Baik

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (Diolah).

Berdasarkan Tabel 5, kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kota Jambi periode 2020–2024 berada pada kategori sangat baik dengan rata-rata sebesar 64,93%. Kontribusi ini cenderung meningkat meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa pajak daerah menjadi komponen utama dalam pembentukan PAD.

Tabel 6. Kontribusi Retribusi Daerah

Tahun	Retribusi Daerah (Miliar)	PAD (%)	Kontribusi (%)	Kriteria
2020	355,67	40,480	11,38	Kurang
2021	384,73	51,84	13,47	Kurang
2022	436,89	40,22	9,21	Sangat Kurang
2023	415,34	36,13	7,01	Sangat Kurang
2024	455,26	32,37	7,11	Sangat Kurang
Rata-rata			9,64	Kurang

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (Diolah)

Berdasarkan Tabel 6, kontribusi retribusi daerah terhadap PAD Kota Jambi periode 2020–2024 tergolong rendah dengan rata-rata sebesar 9,64% (kurang). Kontribusi ini cenderung menurun dari tahun ke tahun dan sebagian besar berada pada kategori sangat kurang. Hal ini menunjukkan bahwa peran retribusi

daerah dalam pembentukan PAD masih relatif kecil.

Tabel 7. Kontribusi BUMD

Tahun	BUMD (Miliar)	PAD (Miliar)	Kontribusi (%)	Kriteria
2020	355,67	9,6	2,70	Sangat Kurang
2021	384,73	9,64	2,51	Sangat Kurang
2022	436,89	10,53	2,41	Sangat Kurang
2023	415,34	10,64	2,06	Sangat Kurang
2024	455,26	18,91	4,15	Sangat Kurang
Rata-rata			2,77	Sangat Kurang

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (Diolah)

Berdasarkan Tabel 7, kontribusi BUMD terhadap PAD Kota Jambi periode 2020–2024 tergolong sangat rendah dengan rata-rata sebesar 2,77% (sangat kurang). Meskipun terdapat peningkatan pada tahun 2024, secara umum kontribusinya masih kecil. Hal ini menunjukkan bahwa peran BUMD dalam pembentukan PAD belum optimal.

Tabel 8. Kontribusi Lain-Lain PAD

Tahun	Lain-lain PAD Yang Sah (Miliar)	PAD (Miliar)	Kontribusi (%)	Kriteria
2020	355,67	88,63	24,92	Sedang
2021	384,73	78,52	20,41	Sedang
2022	436,89	84,34	19,30	Kurang
2023	415,34	67,77	13,15	Kurang
2024	455,26	73,92	16,24	Kurang
Rata-rata			18,80	Kurang

Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (Diolah)

Berdasarkan Tabel 8, kontribusi lain-lain PAD yang sah terhadap PAD Kota Jambi periode 2020–2024 tergolong kurang dengan rata-rata sebesar 18,80%. Kontribusinya cenderung menurun dari kategori sedang menjadi kurang. Hal ini menunjukkan bahwa peran komponen ini dalam pembentukan PAD masih

belum optimal.

Tabel 9. Kontribusi PAD

Tahun	Realisasi PAD (Miliar)	Total Pendapatan Daerah (Miliar)	Kontribusi (%)	Kriteria
2020	355,67	1.621,83	21,93	Sedang
2021	384,73	1.652,95	23,28	Sedang
2022	436,89	1.668,66	26,18	Sedang
2023	415,39	1.539,45	26,98	Sedang
2024	455,26	1.765,18	25,79	Sedang
Rata-rata			24,83	Sedang

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (Diolah)

Berdasarkan hasil analisis, kontribusi PAD Kota Jambi masih didominasi oleh pajak daerah dengan rata-rata sebesar 64,93% (sangat baik), yang menunjukkan bahwa pajak menjadi sumber utama penerimaan daerah. Sebaliknya, retribusi daerah hanya memberikan kontribusi rata-rata 9,64% (kurang) dan cenderung menurun, menandakan belum optimalnya pemanfaatan potensi retribusi. Kontribusi BUMD juga sangat kecil, yaitu rata-rata 2,77% (sangat kurang), sehingga perannya terhadap PAD masih belum signifikan. Sementara itu, lain-lain PAD yang sah memiliki kontribusi rata-rata 18,80% (kurang) dan menunjukkan tren menurun.

Secara keseluruhan, kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah sebesar 24,83% (sedang), yang mengindikasikan bahwa tingkat kemandirian fiskal Kota Jambi masih terbatas dan masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.

2) Analisis Efektifitas Komponen PAD

Tabel 10. Efektivitas Pajak Daerah

Tahun	Realisasi Pajak Daerah (Miliar)	Target Pajak Daerah (Miliar)	Efektivitas (%)	Kriteria
2020	255	216,96	85,08	Cukup Efektif
2021	270,86	244,73	90,35	Cukup Efektif
2022	317,88	301,80	94,94	Efektif
2023	355	301,36	84,89	Cukup Efektif
2024	390	330,06	84,63	Cukup Efektif
Rata-rata			87,98	Cukup Efektif

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (Diolah)

Berdasarkan Tabel 10, efektivitas pajak daerah Kota Jambi periode 2020–2024 tergolong cukup efektif dengan rata-rata sebesar 87,98%. Nilai efektivitas cenderung stabil dan sebagian besar berada pada kategori cukup efektif, meskipun pada tahun 2022 mencapai kategori efektif. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak daerah umumnya telah mendekati target yang ditetapkan.

Tabel 11. Efektivitas Retribusi Daerah

Tahun	Realisasi Retribusi Daerah (Miliar)	Target Retribusi Daerah (Miliar)	Efektivitas (%)	Kriteria
2020	47,570	40,480	85,10	Cukup Efektif
2021	47,880	51,840	108,27	Sangat Efektif
2022	49,760	40,220	80,83	Cukup Efektif
2023	56,230	36,130	64,25	Kurang Efektif
2024	60,190	32,370	53,78	Tidak Efektif
Rata-rata			78,45	Kurang Efektif

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (Diolah)

Berdasarkan Tabel 11, efektivitas retribusi daerah Kota Jambi periode 2020–2024 tergolong kurang efektif dengan rata-rata sebesar 78,45%. Meskipun pada tahun 2021 mencapai kategori sangat efektif,

secara umum efektivitas cenderung menurun hingga masuk kategori tidak efektif pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi penerimaan retribusi daerah belum konsisten dalam mencapai target yang ditetapkan.

Tabel 12. Efektivitas BUMD

Tahun	Realisasi BUMD (Miliar)	Target BUMD (Miliar)	Efektivitas (%)	Kriteria
2020	10	9,6	96,00	Efektif
2021	9,6	9,64	100,42	Efektif
2022	9,6	10,53	109,69	Sangat Efektif
2023	10	10,64	106,40	Sangat Efektif
2024	10,53	18,91	179,58	Sangat Efektif
Rata-rata			118,42	Sangat Efektif

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (Diolah)

Berdasarkan Tabel 12, efektivitas BUMD Kota Jambi periode 2020–2024 tergolong sangat efektif dengan rata-rata sebesar 118,42%. Nilai efektivitas cenderung meningkat dan sebagian besar berada pada kategori sangat efektif. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi penerimaan BUMD mampu melampaui target yang telah ditetapkan.

Tabel 13. Efektivitas Lain-lain PAD

Tahun	Realisasi Lain-lain PAD (Miliar)	Target Lain-lain PAD (Miliar)	Efektivitas (%)	Kriteria
2020	90,92	88,63	97,49	Efektif
2021	91,23	78,52	86,07	Cukup Efektif
2022	88,64	84,34	95,15	Efektif
2023	94,11	67,77	72,01	Kurang Efektif
2024	84,82	73,92	87,15	Cukup Efektif
Rata-rata			87,57	Cukup Efektif

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (Diolah)

Berdasarkan Tabel 13, efektivitas lain-lain PAD yang sah Kota Jambi periode 2020–2024

tergolong cukup efektif dengan rata-rata sebesar 87,57%. Nilai efektivitas cenderung berfluktuasi, dengan sebagian tahun berada pada kategori efektif dan sebagian lainnya cukup efektif hingga kurang efektif. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi penerimaan belum sepenuhnya konsisten dalam mencapai target yang ditetapkan.

Tabel 14. Efektivitas PAD

Tahun	Realisasi PAD (Miliar)	Target PAD (Miliar)	Efektivitas (%)	Kriteria
2020	403,48	355,67	88,15	Cukup Efektif
2021	419,56	384,73	91,70	Efektif
2022	465,89	436,89	93,78	Efektif
2023	515,34	415,39	80,61	Cukup Efektif
2024	545,54	455,26	83,45	Cukup Efektif
Rata-rata			87,54	Cukup Efektif

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (Diolah)

Berdasarkan hasil analisis, efektivitas PAD Kota Jambi menunjukkan kinerja yang bervariasi pada setiap komponennya. Pajak daerah memiliki tingkat efektivitas rata-rata sebesar 87,98% (cukup efektif), yang menunjukkan bahwa realisasi penerimaan umumnya telah mendekati target. Sebaliknya, retribusi daerah memiliki efektivitas rata-rata 78,45% (kurang efektif) dan cenderung menurun, menandakan belum optimalnya pencapaian target. Efektivitas BUMD tergolong sangat efektif dengan rata-rata sebesar 118,42%, yang menunjukkan bahwa realisasi penerimaan mampu

melampaui target yang ditetapkan. Sementara itu, lain-lain PAD yang sah memiliki efektivitas rata-rata sebesar 87,57% (cukup efektif) dengan kondisi yang berfluktuasi.

Secara keseluruhan, efektivitas PAD Kota Jambi tergolong cukup baik, namun masih terdapat komponen yang perlu dioptimalkan, khususnya retribusi daerah agar kinerja penerimaan daerah dapat lebih maksimal.

3) Analisis Derajat Desentralisasi Fiskal

Tabel 15. Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Jambi

Tahun	PAD (Miliar)	Total PAD (Miliar)	DDF (%)	Kriteria
2020	355,67	1.621,83	21,93	Sedang
2021	384,73	1.652,95	23,28	Sedang
2022	436,89	1.668,66	26,18	Sedang
2023	415,39	1.539,45	26,98	Sedang
2024	455,26	1.765,18	25,79	Sedang
Rata-rata			24,83	Sedang

Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (Diolah)

Berdasarkan Tabel 15, derajat desentralisasi fiskal Kota Jambi periode 2020–2024 berada pada kategori sedang dengan rata-rata sebesar 24,83%. Nilai DDF menunjukkan kecenderungan meningkat hingga tahun 2023, meskipun sedikit menurun pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan keuangan daerah dalam membiayai kebutuhan sendiri melalui

PAD sudah cukup baik, namun masih terdapat ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jambi periode 2020–2024, dapat disimpulkan bahwa kontribusi PAD masih didominasi oleh pajak daerah dengan kategori sangat baik sehingga menjadi sumber utama penerimaan daerah, sementara kontribusi retribusi daerah, BUMD, dan lain-lain PAD yang sah relatif lebih rendah, bahkan sebagian besar berada pada kategori kurang hingga sangat kurang, yang menunjukkan belum optimalnya pemanfaatan potensi sumber-sumber tersebut. Dari sisi efektivitas, pajak daerah dan lain-lain PAD yang sah tergolong cukup efektif, sedangkan BUMD menunjukkan kinerja sangat efektif karena mampu melampaui target, namun retribusi daerah masih tergolong kurang efektif dan cenderung menurun sehingga menjadi komponen yang paling lemah dalam pencapaian PAD. Selanjutnya, derajat desentralisasi fiskal Kota Jambi berada pada kategori sedang dengan rata-rata 24,83%, yang

mengindikasikan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah masih terbatas dan belum mampu mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat. Berdasarkan temuan tersebut, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan komponen PAD yang masih lemah, khususnya retribusi daerah, melalui perbaikan sistem pemungutan, peningkatan pengawasan, serta penguatan kesadaran masyarakat, disertai peningkatan pengelolaan BUMD dan diversifikasi sumber pendapatan agar kontribusinya lebih signifikan dalam mendukung kemandirian fiskal. Selain itu, penelitian ini memiliki keterbatasan pada penggunaan data sekunder dan periode pengamatan yang relatif singkat, sehingga penelitian selanjutnya disarankan menggunakan periode yang lebih panjang serta menambahkan variabel lain yang relevan guna memperoleh hasil analisis yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, S., & Halim, A. (2006). Studi atas Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan Belanja Pemeliharaan dan Sumber Pendapatan. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, 2(2), 17–32.

- <https://doi.org/10.2139/ssrn.2168571>
- Aminuddin, N., & Winarningsih, S. (2024). Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan dan Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah dalam Era Otonomi Daerah. *Journal of Economics and Business UBS*, 13(1).
- Ardianto, Y., Andamari, B. G., & Widya, N. P. (2024). *The Effectiveness of Regional Tax and Levies Acceptances and Its Contribution to the Original Regional Revenue of DKI Jakarta Province*. 07(10), 6180–6188. <https://doi.org/10.47191/jefms/v7>
- Cendra. (2025). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2021-2023. *Jurnal Kajian Pemerintah (JKP)*, 11(2), 167–176. [https://doi.org/10.25299/jkp.2025.vol11\(2\).22927](https://doi.org/10.25299/jkp.2025.vol11(2).22927)
- Dahlia. (2018). Analisis Efektifitas dan Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banda Aceh. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Teknologi (EMT)*, 2(2), 82–88. <https://journal.lembagakita.org/index.php/emt/article/download/57/46>
- Faradilla, S. P., & Hanifa, N. (2024). Analisis Rasio Efektivitas PAD, Efisiensi PAD, dan Kemandirian Kota Surabaya. *INDEPENDENT: Journal of Economics*, 4(3), 94–104. <https://doi.org/10.26740/independent.v4i3.65910>
- Febriana, V. S., & Galuh, A. K. (2025). *An Analysis of the Effectiveness and the Contribution of Local Taxes and Local User Fees on the Local Own-Source Revenue Improvement in East Java*. 4(2), 373–386.
- Halim, A. (2004). *Akuntansi Sektor Publik – Akuntansi Keuangan Daerah* (Revisi). Penerbit Salemba Empat, Jakarta. <https://doi.org/10.24002/kinerja.v8i2.898>
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah* (Edisi 4). Salemba Empat, Jakarta. <https://doi.org/10.24002/kinerja.v8i2.898>
- Handraini, H., Frinald, A., & Magriasti, L. (2024). Konsep Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Desa Di Indonesia. *Jurnal Professional*, 11(2), 601–608. <https://doi.org/10.37676/professional.v11i2.7226>
- Haryanto, J. T., & Astuti, E. S. (2015). Desentralisasi Fiskal Dan Penciptaan Stabilitas Keuangan Daerah. *Kajian Ekonomi Dan Keuangan*, 13(1), 50–62. <https://doi.org/10.31685/kek.v13i1.88>
- Jurjani, Putra, A., & Nurdin. (2025). The Role Of Local Own-Source Revenue And Capital Expenditure In Driving Regional Economic Growth (A Study On Muaro Jambi Regency). *JURNAL DEVELOPMENT*, 13(2), 221–234. <https://doi.org/10.53978/jd.v13i2.628>
- Kristina, S. R., Siwu, A. T. N., & DJ, H. F. (2021). The Effect of Local Revenue (PAD) and Balancing Funds on the Regional Financial Independence of Central Halmahera District. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi (EMBA)*, 9(1), 453–461. <https://doi.org/10.35794/emba.v9i1.32235>
- Maharani, R., Fadjar, A., & Sastrawan,

- E. (2023). Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sebagai Upaya Menuju Kemandirian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. *Manajemen Kreatif Jurnal*, 1(2), 186–196. <https://doi.org/10.55606/makreju.v1i2.1353>
- Mahmudi, M. (2016). Analisis laporan keuangan pemerintah daerah. Edisi Ketiga, Upp Stim Ykpn, Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2018). *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah* (Terbaru). Penerbit ANDI, Yogyakarta.
- Marhamah, M., & Harsono, I. (2025). Analisis Pendapatan Asli Daerah Untuk Mengukur Kemandirian Keuangan Daerah di Kota Mataram Tahun 2018-2023. *IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial*, 6(3), 349–360. <https://doi.org/10.54543/syntaximperatif.v6i3.699>
- Nabila, H., Nasution, M. I., & Rizkina, M. (2025). Analysis of Regional Tax Effectiveness and Contribution to Increasing the Local Own Revenue (PAD) of Binjai City. *Formosa Journal of Sustainable Research (FJSR)*, 4(4), 693–704. <https://doi.org/10.55927/fjsr.v4i4.186>
- Nurhayati. (2015). Analisis Potensi Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*, 4(2), 97–108. <https://doi.org/10.30606/cano>
- Parulian, R. J., Deliana, D., & Napitupulu, I. H. (2024). Analisis Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Ditinjau Dari Kontribusi PAD , Elastisitas PAD dan Kinerja Pajak Daerah Pada Pemerintah Kota Sibolga. *Journal Of Accounting and Finance Management (JAFM)*, 5(4), 744–760. <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jafm.v5i4>
- Surgawati, L. (2021). Analisis Derajat Desentralisasi Fiskal Pada Kabupaten/Kota Di Indonesia Menjelang 20 Tahun Otonomi Daerah. *WELFARE Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2(2), 75–85. <https://doi.org/10.37058/wlfr.v2i2.3566>
- Wiarta, I., Handayani, R., Syafa`at, A., & Harly, A. Y. (2021). Identifikasi Sumber Pendapatan Asli Daerah pada Pajak Daerah Kota Jambi. *Jurnal Manajemen Dan Sains (J-MAS)*, 6(2), 497–499. <https://doi.org/10.33087/jmas.v6i2.317>